

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan ini menggambarkan bahwa otonomi daerah tidak sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai undang-undang untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan formal dari suatu negara biasanya di identikan dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (Afiffuddin, 2010:78).

Kota-kota di Indonesia pada berkembang tanpa di landasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, kota-kota kita tidak betul-betul dipersiapkan atau di rencanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Menurut Yulius Nyerere, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan.

Oleh karena itu, bukanlah suatu pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda. Di satu sisi kota-kota besar memperlihatkan perkembangan pembangunan fisik yang serba mengesankan disepanjang tepi jalan utama kota. Sementara itu, di kota-kota besar di Indonesia menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya. Seperti terjadi pembuangan sampah sembarangan ditepi jalan yang merupakan pusat keramaian.

Dalam keadaannya, tempat formal yang pada umumnya berfungsi sebagai arus lalu lintas bagi pengguna jalan beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 28 ayat 2 menjelaskan bahwasanya “dilarang perbuatan yang mengakibatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan pada fungsi jalan termasuk trotoar”. Hal ini telah merupakan pelanggaran dengan berjualan memanfaatkan jalan dan ini adalah fenomena yang sering terbaikan, meski telah diatasi namun akan terus terjadi sejalan dengan bertambahnya pedagang kaki lima secara terus menerus tanpa ada sikap yang tegas dalam penanganannya.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang berkembang pesat sebagai ibu kota provinsi Riau. Pekanbaru memiliki fasilitas berbagai publik yang memadai dan juga tempat berkembangnya investor ekonomi. Perkembangan pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, dan sarana hiburan. Dengan adanya hak otonomi daerah dari pemerintah pusat, Pekanbaru dapat mengurus rumah tangganya sendiri seperti hanya dalam hal kebijakan public sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan yang berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat persaingan yang ada dalam hal mengikuti arus perubahan contohnya pedagang. Para pedagang yang mana sebagian besar tidak memiliki modal yang besar untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan pemerintah pekanbaru. Pada akhirnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin dari pemerintah memanfaatkan fasilitas umum seperti tepi jalan bahkan hingga keatas trotoar hanya untuk menjajakan dagangannya kepada konsumen yang lewat. Hal ini harus segera dicegah sebelum terjadinya pertambahan Pedagang Kaki Lima (PKL) setiap tahunnya.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, dan aktifitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang informal berupa fasilitas umum menurut Akhirudin (1982) dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan (2004:202). Sebagian besar dagangan yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima adalah keperluan sehari-hari masyarakat Pekanbaru seperti pakaian, sepatu dan makanan ringan. Dan biasanya Pedagang Kaki Lima (PKL) identik dengan usaha kecil-kecilan dan sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah, dikarenakan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki izin usaha atau mendirikan bangunan sebagai tempat usahanya.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena sosial sulit dihindari keberadaanya bagi kehidupan dikota-kota di Indonesia. Pedagang Kaki Lima beraktivitas dengan memanfaatkan fasilitas umum yang dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas dagang. Hal ini dikarenakan fasilitas umum misalkan (tepi jalan) merupakan tempat yang diminati oleh pedagang untuk menjajakan dagangannya, dimana tepi jalan merupakan arus lalu lintas orang banyak dan ini menjadikan tepi jalan sebagai areal perdagangan bagi PKL. Dengan demikian, lebih mudah bagi pedagang menawarkan dagangannya pada konsumen yang lewat karena pengguna lalu lintas dapat langsung berhenti ditepi jalan untuk membelinya (Observasi tgl 01 Februari 2017).

Berdasarkan observasi peneliti, problem Pedagang Kaki Lima(PKL) dikota Pekanbaru masih terlihat ramai. Oleh karena itu, pemerintah daerah kota Pekanbaru harus melakukan upaya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara mengeluarkan perda tentang kawasan bebas PKL. Dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2002, Tentang Ketertiban Umum, Bab V pasal 19, ayat (1) yang berbunyi : Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini menunjukkan larangan berdagang dengan menggunakan fasilitas umum berupa trotar dan badan jalan, sesuai dengan pernyataan pada pasal 19 ayat 1 Perda No 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Pedagang kaki lima yang berdagang ditepi jalan jelas nyatanya telah melanggar aturan yang ada.

Adapun bagian jalan yang dilarang berdagang berdasarkan peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 yaitu terdapat pada pasal 1 bab ketentuan umum yang mana jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (Selokan, Trotoar, tanda rambu-rambu jalan raya dan sebagainya), yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, bagian yang dilarang oleh pemerintah untuk berjualan ialah bagian dalam jalan, trotoar hingga ke selokan pinggiran jalan. Bagian-bagian tersebut merupakan daerah yang dilarang oleh pemerintah untuk berjualan berdasarkan peraturan daerah yang ada. Selain dari hal-hal diatas, maka diperbolehkan untuk berjualan atas izin dari pemerintah kota Pekanbaru.

Banyak bermunculannya para pedagang di jalan HR. Soebrantas akan menimbulkan efek samping, yaitu dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya tidak teratur menjadikan kota semakin padat, menjadikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan perkotaan menjadi kotor disebabkan sampah peninggalan dari para pedagang, menimbulkan kemacetan disebabkan penyempitan jalan yang akan berakibat pada pengguna pejalan kaki. Hal ini disebabkan oleh pemakaian jalan, trotoar dan selokan ditepi jalan yang akhirnya mengurangi fungsi jalan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2017 dikawasan jalan HR. Soebrantas, belakangan ini sudah kurang sering ada penertiban atau razia yang dilakukan oleh Satpol PP atau pun dinas-dinas terkait lainnya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang ada dilapangan yang nyatanya masih banyaknya PedagangKaki Lima yang berjualan disepanjang jalan HR. Soebrantas yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap perda Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2002 yang menimbulkan efek disekelilingnya seperti efek kotor. Data yang penulis peroleh dari pihak Satpol PP, terakhir diadakannya penertiban kepada para pedagang pada 29 Februari 2016 di jalan Soebrantas (sumber : Rekapitulasi hasil laporan operasinonal Satpol PP 21 Februari 2017). Pihak Satpol PP hanya menertibkan PKL yang ada dijalan tersebut tanpa mendatanya.

Untuk mengetahui jumlah Pedagang kaki lima yang ada di jalan HR. Soebrantas peneliti melakukan survey secara langsung ke lapangan dan juga diperkuat dengan data yang ada. Dikarenakan data yang diperoleh tidak bersifat tetap, maka hanya dapat dijadikan referensi dalam menentukan jumlahnya. Adapun jumlah PKL di jalan HR. Soebrantas antara lain sebagai berikut :

Table 1.1 : Jumlah Pedagang Kaki Lima di Soebrantas

No	Jenis Dagangan	Legal	Illegal	Jumlah
1.	Sepatu	-	√	22 pedagang
2.	Pakaian (Baju, celana, handuk, dll)	-	√	44 Pedagang
3.	Koper, Tas dan sandal	-	√	29 Pedagang
4.	Makanan dan Minuman	-	√	43 Pedagang
5.	Jenis Mainan, pernak-pernik & souvenir	-	√	45 Pedagang
	Jumlah			283 Pedagang

Sumber: Kantor Camat Tampan, 2017

Jumlah populasi Pedagang Kaki Lima diatas menunjukkan hasil bahwa masih banyaknya pkl yang melanggar perda ketertiban umum. Jumlah pedagang sepatu ada 22 pedagang, pakaian lengkap ada 44 pedagang dan pedagang koper, tas serta sandal ada 29 pedagang. Ditambah lagi pedagang makanan dan minuman ada 43 pedagang serta jenis mainan,pernak-pernik dan juga souvenir ada 45 pedagang. Total dari keseluruhannya ada 283 pedagang yang berjualan di jalan Soebrantas. Data pedagang diatas terlihat disepanjang jalan Sobrantas mulai dari simpang baru Panam hingga menjelang simpang pasar buah Arengka. Hal ini masih relative, dapat lihat bahwa fenomena sosial pedagang kaki lima ini bersifat musiman. Oleh karena, jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Data diatas juga berdasarkan hasil observasi penulis dan ini bersifat relative, dikarenakan bisa bertambah atau berkurang jumlahnya sesuai dengan kondisi iklim PKL dilapangan. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah jumlah ini dapat menjadi acuan terhadap populasi PKL yang ada di jalan HR. Soebrantas karena ini bersifat relatif. Titik-titik yang menjadi pusat banyak Pedagang Kaki Lima berjualan ditepi jalan Soebrantas yakni mulai Simpang Baru Panam hingga didepan Pasar Selasa, depan kompleks UNRI, sekeliling Rumah Sakit Awal Bross dan selanjutnya sekitar kompleks perbelanjaan Pasar Swalayan Ramayana Robinson Panam. Tempat-tempat tersebut yang merupakan titi dimana banyaknya PKL yang berjualan. Keadaan ini juga dapat berubah sewaktu-waktu, bisa jadi berkurang atau bahkan semakin bertambahnya jumlah PKL yang berdagang di jalan Soebrantas dikarenakan sifat dari PKL itu sendiri ialah berpindah-pindah (bersifat tidak tetap).

Dengan demikian, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif, dapat dilihat semakin banyaknya PKL yang kembali beroperasi dijalanan meskipun pernah digusur atau ditertibkan oleh pemerintah sebelumnya Pada tanggal 29 Februari 2017 (sumber : Satpol PP bid. Operasional) . Hal ini menekankan bahwa fenomena sosial khususnya PKL diarea perkotaan sulit diselesaikan. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai PKL.:

Berikut adalah data yang penulis peroleh dari pihak aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah diamankan dan ditertibkan oleh pihak pemerintah yakni sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang kaki Lima Yang Telah Ditertibkan

NO	Bulan	Jumlah Penertiban
1	Januari	23
2	Februari	21
3	Maret	19
4	April	21
5	Mei	21
6	Juni	24
7	Juli	21
8	Agustus	22
9	September	18
10	Oktober	19
11	November	20
12	Desember	22
Total		251

Sumber : Data Rekapitulasi Satpol PP Bag. Operasional 2017

Jumlah Pedagang Kaki Lima yang telah ditertibkan diatas menunjukkan hasil bahwa masih banyaknya pkl yang melanggar perda ketertiban umum dengan terbuktinya data penertibaban tersebut. Jumlah penertiban pada bulan Januari ada 23 pedagang, Februari ada 21 pedagang, Maret ada 19 pedagang, April ada 21 pedagang, Mei ada 21 pedagang, Juni ada 24 pedagang, Juli ada 21 pedagang, Agustus ada 22 pedagang, September ada 18 pedagang, Oktober ada 19 pedagang, November ada 20 pedagang dan Desember ada 22 pedagang. Jadi total keseluruhan pedagang yang telah ditertibkan berjumlah 251 pedagang. Data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran tentang ketertiban umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh para pedagang di jalan Soebrantas.

Pemerintah daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di kawasan sepanjang tepi jalan Soebrantas dan ruas jalan lainnya. Kebijakan tersebut memuat penataan kota untuk memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima, sehingga memberi kesadaran para pedagang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota yang dinamis.

Fenomena pedagang kaki lima yang berdagang ditepi jalan Soebrantas yang menggunakan gerobak dan lain-lain sudah melanggar perda. Seperti halnya yang dimaksud pada pasal 6 yang berbunyi “Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan”.

Berdagang ditepi jalan hingga ke trotoar oleh pedagang kaki lima yang akan melahirkan dampak seperti meninggalkan sampah, merusak bagian jalan dan lain-lain. Hal ini jelas telah melanggar perda terdapat pada poin pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu :

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, kecuali oleh para petugas yang ditunjuk oleh Walikota atau kepentingan Dinas.
- (2) Dilarang membuang sampah dan menumpuk kotoran/sampah, di jalan, di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dan diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Ini tidak sesuai lagi dengan perda yang berlaku.

Perda diatas menjelaskan bahwa kegiatan pedagang kaki lima adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, yang fokus utama pelanggaran PKL terhadap Perda yaitu khusus dijelaskan pada pasal 19 ayat (1). Akan tetapi, Perda tersebut tidak terimplementasi secara maksimal karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan HR. Soebrantas, di Kecamatan Tampan hingga kini. Pemerintah daerah setempat tidak dapat menyikapi masalah sosial pedagang kaki lima itu hanya dengan penertiban dan pemberian hukuman, karena masalah sosial pedagang kaki lima juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus memberikan tempat yang layak untuk melakukan usaha dan mengurangi jumlah pengangguran. Bila masalah ini terus berlarut maka keberadaan pedagang kaki lima ini akan sangat mengganggu keberadaan pengguna jalan lainnya dan menimbulkan dampak yang tidak baik.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menata dagangannya persis ditepi jalan akan berdampak pada keindahan kota, seharusnya posisi mereka harus dibelakang parit. Apabila mereka berdagang dibelakang parit maka tidak akan dirazia. Hal ini dikarenakan posisi dari parit hingga ke badan jalan meruakan fasilitas umum yang dilarang oleh pemerintah untuk berdagang. Ketidakteraturan posisi pedagang yang menjual dagangannya ditepi jalan mengurangi unsur keindahan pada kota, ditambah lagi sampah peninggalan para pedagang yang berserakan dibiarkan saja dan mengotori jalan dan fasilitas umum yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada kenyataannya, usaha yang dilakukan oleh Satpol PP tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sebagaimana tugas Satpol PP ialah menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar perda Ketertiban Umum No 5 Th 2002. Setelah penertiban dilakukan, para pedagang masih saja kembali berjualan dan ini berlangsung berulang-ulang. Hal ini terjadi karena setelah penertiban dilakukan, tidak ada pembinaan yang baik oleh pemerintah kota serta belum adanya tindakan/sanksi yang tegas dari Satpol PP ataupun Pemda setempat sehingga dapat membuat efek jera pedagang kaki lima untuk tidak berdagang ditepi jalan HR. Soebrantas lagi.

Para pedagang yang berjualan ditepi jalan ketika ditanya mengenai izinnya pada saat obeservasi dilakukan bahwa mereka memporeh izin dari pihak pemilik ruko saja dan mereka tidak memiliki izin usaha secara resmi dari pemko Pekanbaru. Seharusnya ada pemberitahuan larangan yang bersifat permanen seperti halnya membuat papan pengumuman tentang larangan berdagang beserta sanksinya jika berdagang ditepi jalan Soebrantas. Sehingga masalah ketertiban umum tersebut kurang dipahami oleh para PKL dikarenakan bersifat tidak tetap.

Tidak adanya sanksi tegas bagi pedagang kaki lima yang tidk memiliki izin usaha dari pemerintah kota, padahal dalam Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dijelaskan bahwa setiap orang/badan yang melanggar ketentuan pasal peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis pada pedagang kaki lima pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 25 Februari 2017, dimana pedagang tersebut masih bedagang ditepi jalan Soebrantas tanpa memiliki izin usaha dari pemerintah kota. Akibatnya masih banyaknya Pedagang Kaki Lima ditepi jalan Soebrantas yang berjualan tanpa mengantongi izin usaha dari pemerintah (hasil wawancara tanggal 25 Februari 2017).

Pihak pemerintah melalui Satpol PP harus selalu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima yang ada d Kota Pekanbaru yang juga merupakan bagian dari tugas Satpol PP. Dengan demikian, lambat laun para pedagang kaki lima akan jera untuk berdagang di tepi jalan lagi. Hal ini juga bertujuan untuk memperingati para pedagang yang masih bersikeras berdagang dengan menggunakan fasilitas umum serta himbauan bagi para PKL yang baru akan membuka lapak dagangan di fasiliias umum tersebut.

Pengawasan dan penertiban merupakan cara mengatasi PKL yang melanggar perda keertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PKL sebanyak 4 kali dalam sehari. Pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Satpol PP yang ada di jalan-jalan besar kota Pekanbaru seperti Jl. Jend. Sudirman, Jl. Teratai, Jl. Soekarno-Hatta, Jl Tuanku Thambusai Jl. SM. Yamin dan juga Jl. HR. Soebrantas.

Berikut merupakan pemetaan lokasi terhadap tempat-tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai berikut :

Tabel 1.3 Peta Lokasi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Untuk PKL

NO	Lokasi Yang Diperbolehkan Untuk PKL	Lokasi Yang Tidak Diperbolehkan Untuk PKL
1	Pasar Rumbai	Tepi jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Pasar Palapa	Jalur Hijau Taman
3	Pasar Sail	Tempat-Tempat Umum
4	Pasar Lima Puluh	Trotoar
5	Pasar Cik Puan	Halte Bus
6	Pasar Panam	Diatas Selokan
7	Pasar Pagi Arengka	Fasilitas-Fasilitas Umum
8	Pasar Kodim	Kawasan Militer
9	Pasar Dupa	Jalur Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber : Kantor Satpol PP Bag. Operasional 2017

Tabel diatas menunjukkan tempat yang diperbolehkan dan tempat yang tidak diperbolehkan berjualan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota No. 18845/183/35.73.112/2915 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima. Pengawasan dan penertiban khusus di jalan HR. Soebrantas dilakukan oleh Satpol PP berada pada awal minggu ke-3 dimulai pada hari senin tgl 13 Maret 2017 sampai minggu dan ini berulang setiap minggunya. Operasional dimulai pukul 13.30-16.00 untuk Soebrantas, kemudian pukul 16.00-18.30 dan selanjutnya antara pukul 19.00-24.00 . Pengawasan dan penertiban tersebut dilakukan dari hari senin hingga hari minggu dengan sistem shift dengan pleton 1, 2 dan 3 dalam mengawasi dan menertibkannya. Disamping, penertiban PKL juga dilakukan di jalan-jalan besar lainnya seperti yang dijelaskan diatas(Data dilampiran belakang).

Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam mengatur dan menertibkan para pedagang agar bertindak sesuai aturan yang ada. Dengan adanya kegiatan tersebut, penerapan kebijakan melalui perda No 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum diharapkan dapat diterapkan dengan sebaik mungkin oleh pihak Satpol PP.

Berdasarkan fenomena sosial yang telah dijelaskan diatas tentang maraknya Pedagang Kaki Lima ditepi jalan, penulis tertarik melakukan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan judul : *Implementasi Perda No. 05 tahun 2002, Tentang Ketertiban Umum Di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru).*

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di jalan HR. Soebrantas ?
2. Faktor-Faktor penghambat terhadap pelaksanaan implementasi Perda No. 05 tahun 2002, Tentang Ketertiban Umum Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di jalan HR. Soebrantas ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah No. 05 tahun 2002, Tentang Ketertiban Umum Oleh Pemerintah Pekanbaru di Jalan HR. Soebrantas.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Umum Oleh Pemerintah Pekanbaru di Jalan HR. Soebrantas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan peneliti bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya tentang Pedagang Kaki Lima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Bahan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Praktis

Masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi terkait untuk membuat kebijakan hukum yang berupa aturan yang terkait, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Jalan HR. Soebrantas). Studi kasus ini dipilih karena ini menyangkut tentang pelanggaran terhadap Perda yang mengatur ketertiban umum dimasyarakat. Dan peneliti hanya terfokus pada PKL yang ada di jalan Soebrantas sebagai mana variable diatas.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang peraturan daerah tentang terbentuknya Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai, tujuan dan fungsi. Serta struktur organisasi dan profil kota Dumai.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti membahas permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini terdapat simpulan dan saran penelitian.